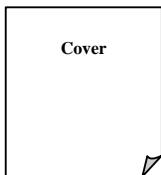


**NASKAH KEBIJAKAN (*POLICY PAPER*)**  
**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM**  
**MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING**  
**KELAPA SAWIT INDONESIA SECARA BERKELANJUTAN**  
**DAN BERKEADILAN**

**Direktorat Pangan Dan Pertanian**  
**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**  
**2010**



Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan / Haryana, A. Jakarta, Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS. 2010.  
ISBN: 978-979-18416-6-5

Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penulis : Arif Haryana, Jarot Indarto, Noor Avianto

Editor : Wahyuningsih Darajati

Narasumber : Dr. Ir. Bambang Dradjat, M.Ec

Penyumbang Materi : Nono Rusono, Anwar Sunari, Dini Maghfirra, M Nail Ritinov

Tata Letak : M Nail Ritinov

Sumber Gambar : <http://t0.gstatic.com/images>

Penerbit : Direktorat Pangan dan Pertanian, BAPPENAS

Gedung TS-2A, Lantai V, Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10310

Telepon: +62-21-31934323; Faksimili: +62-21-3915404;

Email: [pertanian@bappenas.go.id](mailto:pertanian@bappenas.go.id); Situs: [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

## KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, dengan produksi sebesar 20,6 juta ton yang menguasai hampir separuh dari pangsa pasar minyak sawit dunia. Selama tiga puluh tahun terakhir, industri kelapa sawit Indonesia berkembang cukup pesat, hingga mencapai 7,32 juta ha pada tahun 2009. Dengan luas lahan tersebut, lebih dari 80% produksi kelapa sawit nasional merupakan komoditas ekspor dengan berbagai negara tujuan.

Sejarah, potensi dan peluang pembangunan kelapa sawit mengindikasikan bahwa kelapa sawit mempunyai prospek positif ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing. Namun, kelapa sawit juga menghadapi berbagai isu terkait dengan masalah teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Masalah-masalah tersebut perlu di atasi agar pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat terwujud sehingga tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar dunia.

Penyusunan Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) “Kebijakan dan Strategi Dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia secara Berkelanjutan dan Berkeadilan” dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelapa sawit terkait dengan nilai tambah dan daya saing, serta keberlanjutannya. Naskah kebijakan ini disusun melalui studi literatur, diskusi, dan seminar untuk mendapatkan masukan dari narasumber dan para *stakeholder*.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penyusunan Naskah Kebijakan ini, mulai dari persiapan, diskusi, seminar, sampai dengan penulisan laporan. Semoga Naskah Kebijakan ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, Desember 2010  
Direktur Pangan dan Pertanian

Wahyuningsih Darajati



## RINGKASAN

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia dimulai sejak 1970 dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terutama periode 1980-an. Pada tahun 1980 areal kelapa sawit hanya seluas 294 ribu ha dan terus meningkat dengan pesat sehingga pada tahun 2009 mencapai 7,32 juta ha, dengan rincian 47,81% berupa perkebunan besar swasta (PBS), 43,76% perkebunan rakyat (PR), dan 8,43% perkebunan besar Negara (PBN). Dengan luas areal tersebut, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2009, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 20,6 juta ton, diikuti oleh Malaysia pada urutan kedua dengan produksi 17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% dari total produksi. Negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia adalah India dengan pangsa sebesar 33%, Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% dari total ekspor kelapa sawit Indonesia.

Sejarah, potensi dan peluang pembangunan kelapa sawit mengindikasikan bahwa kelapa sawit masih mempunyai prospek positif ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing, dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, kelapa sawit juga menghadapi berbagai masalah/kendala terkait dengan teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Masalah-masalah tersebut perlu di atasi supaya tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Naskah Kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kelapa sawit terkait dengan nilai tambah dan daya saing melalui perumusan usulan kebijakan dan strategi dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan. Perumusan kebijakan dan strategi dilaksanakan melalui *desk study*, analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT), dan serangkaian diskusi dalam forum *focused group discussion* (FGD) dan seminar/lokakarya yang melibatkan *stakeholder* terkait.

Dari serangkaian proses analisis dan diskusi tersebut dihasilkan rumusan kebijakan umum yang diperlukan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, yaitu (i) promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit; (ii) pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit; (iii) penguatan dan penegakan hukum pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) dan tata kelola perizinan, (iv) transparansi

informasi pembangunan kebun kelapa sawit; (v) pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya; (vi) pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut; (vii) penerapan prinsip dan kriteria *Rountable Sustainable Palm Oil* (RSPO); dan (viii) pengembangan mekanisme resolusi konflik.

Secara lebih terinci, masing-masing kebijakan umum tersebut perlu didukung dengan strategi sebagai berikut:

**(i) Promosi, Advokasi dan Kampanye Publik Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan**

Respon kebijakan yang jelas dan tegas untuk menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit dengan memanfaatkan fakta dan hasil penelitian tentang kelapa sawit, serta meningkatkan intensitas promosi dan advokasi untuk memperkuat posisi tawar kelapa sawit Indonesia dengan menggunakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai alat promosi, advokasi dan kampanye publik.

**(ii) Pengembangan Produk (Hilir dan Samping) dan Peningkatan Nilai Tambah**

Pembentukan klaster industri kelapa sawit sesuai dengan potensi produksi kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung dengan (a) pengembangan jaringan infrastruktur secara terintegrasi, (b) insentif fiskal untuk pengadaan peralatan dan mesin-mesin pengolahan produk hilir, (c) prioritas alokasi kredit dan subsidi bunga untuk investasi dan modal kerja untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit, (d) insentif bea keluar untuk ekspor produk hilir dan samping, serta disinsentif bea keluar untuk ekspor bahan mentah dengan tetap memperhatikan keberadaan industri hulu. Disinsentif diberlakukan terutama jika persyaratan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dilanggar, dan (e) penguatan penelitian dan pengembangan (Litbang) kelapa sawit melalui peningkatan anggaran dan investasi Litbang dan kerjasama Litbang antara pemerintah, swasta dan termasuk perguruan tinggi.

**(iii) Penguatan dan Penegakan Hukum dalam Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Tata Kelola Perizinan**

Pengembangan sistem manajemen penerapan hukum dan perizinan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dengan menerapkan indikator dan persyaratan yang jelas dan tertib.

**(iv) Transparansi Informasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit**

Penyediaan dan pemberian informasi oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah tentang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit kepada stakeholders,

khususnya individu dan masyarakat lokal, terkait dengan perizinan, pembangunan kebun dan pengolahan kelapa sawit, dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholders.

**(v) Pengembangan Aksesibilitas Petani Terhadap Sumber Daya**

Strategi operasional dilakukan melalui: (a) Penyediaan fasilitas kredit tanpa jaminan, terutama untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan menggunakan bibit dalam negeri, (b) Penyediaan penyuluh dan tenaga pendamping dalam penerapan inovasi teknologi dan kelembagaan, (c) penyediaan lahan bagi petani untuk menguasai lahan-lahan terlantar atau lahan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (d) pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani agar mempunyai status hukum yang pasti, (e) pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit, seperti penyediaan teknologi, sarana produksi (pupuk organik dan non-organik serta obat-obatan) dan prasarana (alat dan mesin), serta informasi agribisnis terutama bagi perkebunan kelapa sawit rakyat, dan (f) penerapan kerjasama kemitraan antara lembaga petani dan perusahaan yang efektif dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**(vi) Pengendalian Konversi Hutan Alam dan Lahan Gambut**

Strategi dalam operasionalisasi kebijakan ini meliputi: (a) Percepatan padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) semua tingkatan, (b) percepatan pelepasan kawasan hutan pada kategori areal penggunaan lain (APL) dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk moratorium hutan disertai penguatan hukum dalam implementasinya, dan (c) perluasan lahan hanya diijinkan bila produktivitas kebun yang ada sudah mencapai titik optimal dan dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian terlantar.

**(vii) Dorongan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO**

Penerapan prinsip dan criteria RSPO dilakukan melalui: (a) Sosialisasi dan pelatihan penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, terutama kepada petani, (b) monitoring dan evaluasi penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, dan (c) fasilitasi promosi, advokasi dan kampanye positif bahwa pembangunan perkebunan di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

**(viii) Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik**

Untuk mendukung strategi yang ada, pengembangan mekanisme resolusi konflik dilakukan melalui: (a) penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif dari





# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
RINGKASAN .....	V
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR .....	XII
DAFTAR LAMPIRAN .....	XIII
DAFTAR SINGKATAN.....	XIV
DAFTAR SINGKATAN.....	XIV
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN.....	3
1.3. RUANG LINGKUP .....	3
1.4. METODOLOGI .....	3
<b>II. TINJAUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL TAHUN 2010-2014.....</b>	<b>5</b>
2.1. TUJUAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT .....	5
2.2. SASARAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT .....	5
2.3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT .....	6
2.4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT .....	6
<b>III. PERMASALAHAN/ISU KELAPA SAWIT SAAT INI .....</b>	<b>9</b>
<b>IV. ALTERNATIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....</b>	<b>13</b>
4.1. IDENTIFIKASI LINGKUNGAN STRATEGIS DAN ALTERNATIF STRATEGI.....	13
4.1.1. Arab Kebijakan .....	13
4.1.2. Analisis SWOT.....	13
4.1.3. Alternatif Strategi.....	15
4.1.4. Alternatif Kebijakan.....	16
<b>V. ANALISIS ATAS PILIHAN ALTERNATIF .....</b>	<b>19</b>
5.1. ANALISIS KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	19
5.2. ANALISIS KEBIJAKAN .....	20
5.3. STRATEGI OPERASIONAL.....	20
5.3.1. Promosi, Advokasi dan Kampanye Publik Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan.....	21
5.3.2. Pengembangan Produk (Hilir dan Samping) dan Peningkatan Nilai Tambah.....	22
5.3.3. Penguatan dan Penegakan Hukum dalam Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Tata Kelola Perizinan .....	23
5.3.4. Transparansi Informasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit.....	23
5.3.5. Pengembangan Aksesibilitas Petani Terhadap Sumber Daya .....	24
5.3.6. Pengendalian Konversi Hutan Alam dan Laban Gambut .....	24
5.3.7. Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO .....	25
5.3.8. Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik.....	25
<b>VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>27</b>
6.1. KESIMPULAN.....	27
6.2. REKOMENDASI.....	31



## DAFTAR TABEL

TABEL 1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN ALTERNATIF STRATEGI-----	17
TABEL 2. HASIL PEMERINGKATAN ALTERNATIF STRATEGI PENGEMBANGAN DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH KELAPA SAWIT -----	19
TABEL 3. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN BERDASARKAN DAMPAK-----	20

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. KERANGKA ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING DAN NILAI TAMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA. ....	4
GAMBAR 2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT .....	9

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. INDUSTRI HILIR DAN PRODUK SAMPING .....	35
LAMPIRAN 2. EKSPOR MINYAK SAWIT INDONESIA TAHUN 2009.....	36
LAMPIRAN 3. LUAS TANAM 10 JENIS MINYAK NABATI DUNIA .....	37
LAMPIRAN 4. KLASTER INDUSTRI KELAPA SAWIT.....	38

## DAFTAR SINGKATAN

APL	Areal Penggunaan Lain
CPO	<i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Kelapa Sawit)
FGD	<i>focussed group discussion</i> (Diskusi -Kelompok Terfokus)
ISPO	Indonesia Sustainable Palm Oil
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis
PBS	Perkebunan Besar Swasta
PBN	Perkebunan Besar Negara
PR	Perkebunan Rakyat
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPN-DTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
RSPO	Roundtable Sustainable Palm Oil
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Wilayah
TBS	Tandan Buah Segar
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengembangan kelapa sawit di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak tahun 1970 terutama periode 1980-an. Semula pelaku perkebunan kelapa sawit hanya terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN), namun pada tahun yang sama pula dibuka Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR) melalui pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) dan selanjutnya berkembang pola swadaya. Data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (2009) menunjukkan pada tahun 1980 luas areal kelapa sawit adalah 294.000 ha dan pada tahun 2009 luas areal perkebunan kelapa sawit diperkirakan sudah mencapai 7,32 juta ha dimana 47,81% dimiliki oleh PBS, 43,76% dimiliki oleh PR, dan 8,43% dimiliki oleh PBN.

Pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan jumlah produksi diperkirakan sebesar 20,6 juta ton minyak sawit, kemudian diikuti dengan Malaysia dengan jumlah produksi 17,57 juta ton. Produksi kedua negara ini mencapai 85% dari produksi dunia yang sebesar 45,1 juta ton. Sebagian besar hasil produksi minyak sawit di Indonesia merupakan komoditi ekspor. Pangsa ekspor kelapa sawit hingga tahun 2008 mencapai 80% total produksi. India adalah negara tujuan utama ekspor kelapa sawit Indonesia, yaitu 33% dari total ekspor kelapa sawit, kemudian diikuti oleh Cina sebesar 13%, dan Belanda 9% (Oil World, 2010).

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagian besar berada di pulau Sumatera diikuti oleh Kalimantan. Berdasarkan provinsi, Riau merupakan provinsi penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 24% dari produksi nasional pada tahun 2009, sementara Jambi menyumbang minyak sawit sebesar 7,70% dari produksi nasional dengan luas lahan mencapai 8,82% dari luas lahan nasional.

Stakeholders industri kelapa sawit menyadari bahwa kelapa sawit telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian global dan nasional bahkan lokal. Minyak sawit telah menjadi bagian dari minyak nabati dunia dan kontribusinya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Oil World (2009) mencatat produksi minyak sawit tahun 2009 (45,1 juta ton = 34% dari minyak nabati dunia) naik sepuluh kali lipat dibandingkan tahun 1980, sementara minyak kedelai pada periode yang sama hanya naik 2,7 kali lipat.

Pada tataran nasional dan lokal, minyak sawit telah mampu berkontribusi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan/lapangan kerja,

pembangunan sosial dan pengurangan kemiskinan, pengembangan wilayah, pemenuhan kebutuhan pangan dan non-pangan dan ekspor yang mendatangkan devisa bagi negara. Susila (2004) mengutip hasil penelitian Asian Development Bank (ADB, 2002) menunjukkan bahwa nilai koefisien gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan di wilayah perkebunan sawit relatif baik dengan koefisien 0,36. Nilai tersebut termasuk kategori pendapatan yang relatif merata, karena masih di bawah 0,40 sebagai ambang dari mulai ada indikasi ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan yang cukup baik. Jumlah rumah tangga yang pendapatannya sekitar Rp 5 juta yang termasuk katagori miskin relatif kecil. Pendapatan rumah tangga secara umum di atas Rp 10 juta-Rp 25 juta per tahun, yang jauh di atas garis kemiskinan. Proporsi masyarakat ini mencapai di atas 75% dari total rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa perkebunan sawit berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan.

Perkembangan masa depan minyak kelapa sawit juga menjanjikan. Minyak sawit diperkirakan akan mampu memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan global dan domestik, yaitu minyak sawit untuk pangan (*food*), makanan ternak (*feed*), bahan bakar nabati atau biodiesel (*bio-fuel*), dan serat (*bio-fibre*) atau 4-F. Tuntutan kebutuhan di atas muncul sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kenaikan konsumsi per kapita, pergeseran dari konsumsi minyak jenuh hewan, pergeseran penggunaan bahan bakar dari minyak fosil berlatar belakang tuntutan lingkungan, substitusi pakan ternak dan serat.

Namun, beberapa tahun terakhir ini terjadi kekhawatiran yang semakin meningkat tentang persoalan keberlanjutan dari pembangunan kelapa sawit, khususnya berkenaan dengan peningkatan luas areal dan produksi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia (Teoh, 2010). Isu negatif terhadap pembangunan kelapa sawit kemudian dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang berakibat negatif pada perubahan iklim. Isu ini mengakibatkan timbulnya masalah daya saing industri kelapa sawit nasional ke depan.

Dalam situasi tertekan isu negatif tentang pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, industri kelapa sawit Indonesia masih menghadapi masalah lain, yaitu pengembangan produknya masih mengutamakan produksi minyak sawit mentah (CPO). Industri hilir atau industri turunan produk CPO dan produk samping (Lampiran 1) belum berkembang. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009 menunjukkan bahwa ekspor minyak sawit Indonesia mengindikasikan bahwa produk ekspor utama adalah CPO (56%) diikuti berbagai produk olahan sederhana (44%) dalam bentuk olein/minyak goreng dan oleokimia dasar (Lampiran 2).

Saat ini, strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit yang utama tertuang dalam Road Map Kelapa Sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010) dan Road Map Industri



Pengolahan Minyak Sawit (Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2009). Pada kedua Road Map, strategi dan kebijakan tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat keharusan, yaitu mengutamakan penerapan teknologi budidaya dan pengolahan minyak sawit dan produk turunannya. Kedua Road Map juga telah memerinci tentang bagaimana strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit dijalankan. Namun, terkait dengan masalah/isu pembangunan kelapa sawit yang berkembang saat ini, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam kedua Road Map Kelapa Sawit masih perlu disempurnakan.

Berdasarkan prospek, masalah/isu daya saing dan nilai tambah tersebut, dan masih diperlukannya penyempurnaan strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit, BAPPENAS memandang perlu untuk menyusun naskah kebijakan dalam rangka penyesuaian strategi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri kelapa sawit nasional. Naskah kebijakan disusun dengan melakukan review atas strategi dan kebijakan yang saat ini diterapkan untuk masa lima tahun mendatang, yaitu dari 2010-2014.

## 1.2. Tujuan

Penulisan Naskah Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan usulan/rekomendasi rencana kebijakan dan strategi untuk mengatasi isu/masalah yang dihadapi dalam pembangunan kelapa sawit terkait dengan nilai tambah dan daya saing, sehingga memberikan dampak positif pada terlaksananya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Naskah Kebijakan ini dibatasi pada nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia ditinjau dari aspek perkebunan kelapa sawit, perdagangan dan industri olahan kelapa sawit.

## 1.4. Metodologi

Perumusan Naskah Kebijakan ini dilaksanakan dengan menggunakan gabungan beberapa metoda termasuk desk study, analisis SWOT dan serangkaian diskusi dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD). *Desk study* dan analisis SWOT dilaksanakan untuk (i) mengidentifikasi isu-isu yang berkembang dalam pembangunan industri kelapa sawit Indonesia; (ii) memahami perkembangan dan prospek industri kelapa sawit ke depan dan dampaknya terhadap Indonesia; dan (iii) mencoba mengajukan alternatif strategi dan kebijakan peningkatan daya saing dan nilai tambah. Hasil dari analisis tersebut dituangkan dalam bentuk

matrik dan kemudian didiskusikan dalam FGD untuk mendapatkan alternatif kebijakan dan strategi. Selain melalui FGD, alternatif kebijakan dan strategi juga dihasilkan dari serangkaian diskusi dalam Workshop dalam rangka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pembangunan Kelapa Sawit yang juga sedang dilaksanakan secara paralel di Bappenas. Alternatif kebijakan dan strategi pembangunan kelapa sawit kemudian dibahas dan divalidasi dalam sebuah seminar/lokakarya untuk kemudian disusun sebagai Naskah Kebijakan.

Segala isu/masalah minyak sawit seperti diuraikan sebelumnya pada hakekatnya merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Dinamika lingkungan internal menjadi sumber informasi adanya kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), sedangkan dinamika lingkungan eksternal menjadi sumber informasi peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*), industri kelapa sawit Indonesia. Identifikasi kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T) menjadi landasan untuk menyusun alternatif strategi dan kebijakan peningkatan daya saing dan nilai tambah industri kelapa sawit Indonesia (Gambar 2).



**Gambar 1. Kerangka Analisis Strategi dan Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah Industri Kelapa Sawit Indonesia.**

## II. TINJAUAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT NASIONAL TAHUN 2010-2014

Road Map Pembangunan Kelapa Sawit dan Road Map Industri Pengolahan Minyak Sawit merupakan acuan utama dalam meninjau strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit 2010-2014. Hasil tinjauan ini digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit ke depan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Sebelum menganalisis strategi dan kebijakan pembangunan, pemahaman juga dilakukan terhadap tujuan, sasaran, visi dan misi pembangunan kelapa sawit.

### 2.1. Tujuan Pembangunan Kelapa Sawit

Cakupan tujuan pembangunan perkebunan meliputi peningkatan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, devisa negara dari subsektor perkebunan, penyediaan bahan baku bagi industri pangan dan non-pangan termasuk biodiesel, pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah. Cakupan tujuan pembangunan kelapa sawit di atas nampak telah meliputi berbagai aspek pembangunan. Hal ini tidak berlebihan mengingat peran strategis kelapa sawit dalam pembangunan nasional hingga saat ini.

### 2.2. Sasaran Pembangunan Kelapa Sawit

Pembangunan kelapa sawit merupakan salah satu bagian dari pembangunan perkebunan dan industri pengolahan pertanian nasional. Sasaran pembangunan kelapa sawit dengan demikian merupakan bagian dari sasaran makro pembangunan perkebunan dan industri pengolahan pertanian. Sasaran makro pembangunan perkebunan dan industri pengolahan pertanian dari tahun 2010 hingga 2014 meliputi peningkatan PDB dari 2,97% menjadi 3,19% (harga konstan tahun 2000), kesempatan kerja dari 19,78 juta menjadi 21,42 juta orang, investasi dari Rp 45,18 triliun menjadi Rp 68,49 triliun, surplus neraca perdagangan pertanian dari US\$ 28,86 menjadi US\$ 59 milyar, pendapatan pekebun dari US\$ 1600 menjadi US\$ 1840/KK/2 ha, ekspor perkebunan dari US\$ 31,89 menjadi US\$ 61,25 milyar, dan nilai Tukar Petani (NTP) dari 105,2 menjadi 109,28. Pada tataran mikro, sasaran pembangunan kelapa sawit meliputi peningkatan luas areal dari 8.127 ribu ha menjadi 8.987 ribu ha, produksi

CPO dari 23.200 ribu ton menjadi 28.439 ribu ton, dan produktivitas kebun dari 3,9 ton CPO/ha menjadi 4,3 ton CPO/ha.

Dalam periode tahun 2010-2014, pembangunan kelapa sawit dapat mencapai sasaran terbentuknya klaster industri pengolahan dan produk turunannya di provinsi Sumatera Utara dan Riau. Sasaran tersebut dapat dicapai dengan adanya dukungan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

### **2.3. Visi dan Misi Pembangunan Kelapa Sawit**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan tersebut, visi pembangunan perkebunan pada level on-farm ditetapkan terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Sementara misi yang diemban adalah memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi, penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha, pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan, pertumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi, dan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif

Pada level industri pengolahan minyak sawit, visi yang ditetapkan adalah pengembangan industri CPO dan pengembangan industri turunannya untuk peningkatan nilai tambah melalui pendekatan klaster. Dengan klaster, keterkaitan industri berbasis CPO pada semua tingkatan rantai nilai dengan industri huluinya diperkuat sehingga mampu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai.

### **2.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kelapa Sawit**

Strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut diuraikan dalam delapan langkah, yaitu (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman kelapa sawit berkelanjutan, (2) Pengembangan komoditas kelapa sawit, (3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan, (4) Peningkatan investasi usaha kelapa sawit, (5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan, (6) Pengembangan SDM, (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, dan (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan

SDA dan lingkungan hidup. Substansi dari strategi pembangunan perkebunan yang ditetapkan tersebut pada dasarnya merupakan strategi yang berpijak pada pengembangan sumber daya dan lingkungan serta berorientasi produksi komoditas (CPO).

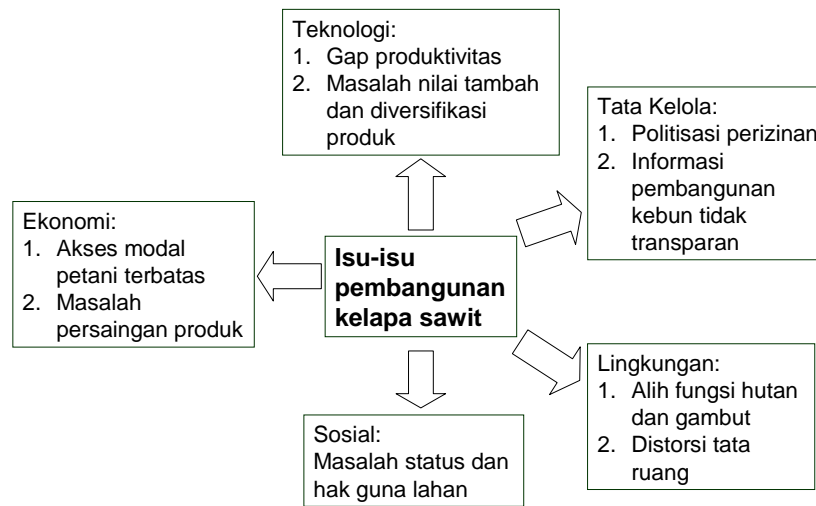
Strategi pembangunan perkebunan di atas didukung sebelas kebijakan yang pada dasarnya merupakan kebijakan peningkatan produksi menuju pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan transparan. Secara rinci kebijakan tersebut meliputi (i) Pengembangan Perkebunan Rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan, (ii) Pengembangan Produktivitas, (iii) Penggunaan dan Penyebaran Bahan Tanaman Unggul, (iv) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Terpadu, (v) Pengembangan SDM, (vi) Pemanfaatan Limbah dan Hasil Samping, (vii) Pengembangan Infrastruktur, (viii) Pengembangan Usaha, (ix) Pengembangan Kemitraan Usaha, (x) Penerapan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan (xi) Pengembangan Sistem Informasi. Secara substansi, kebijakan pembangunan perkebunan tersebut masih berorientasi produksi.

Saat ini, strategi dan kebijakan pembangunan kelapa sawit tertuang dalam Road Map Kelapa Sawit (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010) dan *Road Map* Kelapa Sawit (Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2009). Strategi dan kebijakan tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat keharusan, yaitu mengutamakan penerapan teknologi budidaya dan pengolahan minyak sawit dan produk turunannya. Namun terkait dengan masalah/isu pembangunan kelapa sawit yang berkembang saat ini, strategi pembangunan perkebunan kelapa sawit nampaknya bukan merupakan hasil sintesa masalah dan antisipasi isu pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (aspek sosial, lingkungan dan tata kelola). Strategi dan kebijakan pembangunan perkebunan yang disusun juga masih menitikberatkan pada aspek teknologi dan ekonomi mikro, sedangkan aspek lain masih belum memadai atau belum jelas. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam kedua Road Map Kelapa Sawit masih perlu disempurnakan.



### III. PERMASALAHAN/ISU KELAPA SAWIT SAAT INI

Dari berbagai isu pembangunan kelapa sawit, isu tentang pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dapat dikelompokkan ke dalam aspek teknologi, sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. (Gambar 1).



**Gambar 2. Permasalahan Pembangunan Kelapa Sawit**

Masalah teknologi terkait dengan adanya gap produktivitas antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Dalam analisis Rosdiana (2009), produktivitas perkebunan rakyat di Indonesia tahun 2008 sekitar 2,52 ton CPO/ha/tahun. Tingkat produktivitas tersebut berkisar 35-40% dari capaian rata-rata produktivitas perkebunan perkebunan milik negara dan perkebunan swasta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, tingkat produktivitas PR sekitar 2,86 ton CPO/ha atau setara 13,61 ton TBS (tandan buah segar)/ha, PBN 3,57 ton CPO/ha atau setara 16,98 ton TBS/ha dan PBS 3,51 ton CPO/ha atau setara 16,69 ton TBS/ha. Dengan demikian, peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan tantangan yang tidak ringan.

Masalah teknologi juga menjadi kendala dalam kaitannya dengan nilai tambah. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009 menunjukkan bahwa perbandingan ekspor minyak sawit (CPO) dan produk olahannya sebagai 56% : 44% (Gambar 2). Produk olahan tersebut juga masih dalam bentuk sederhana, seperti olein dan stearin, walaupun Indonesia merupakan

negara produsen dan pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Dalam kaitan teknologi pengolahan ini, CPO masih merupakan hasil utama di Indonesia. Industri kelapa sawit yang menghasilkan produk hilir dan samping minyak sawit belum berkembang karena masih lemah dalam akses dan penguasaannya. Masalah teknologi juga terkait dengan belum pengembangan diversifikasi produk dalam rangka peningkatan nilai tambah. Pengembangan produk ini dalam rangka memperkuat struktur industri berbasis minyak sawit. Peningkatan nilai tambah dan pengembangan produk juga dihadapkan pada lemahnya kebijakan pemerintah dalam pemberian insentif dan penerapan kebijakan. Seperti diketahui, hasil penelitian Nurochmat (2010) menunjukkan bahwa keterkaitan ke depan dan ke belakang dan kekuatan efek pengganda pendapatan, output dan tenaga kerja industri minyak sawit cukup kuat. Hal ini berarti industri hilir kelapa sawit berpotensi untuk dikembangkan.

Masalah ekonomi dalam rangka peningkatan produktivitas Perkebunan Rakyat terkait dengan akses sumber daya. Peningkatan produktivitas Perkebunan Rakyat memerlukan manajemen pemeliharaan yang baik dan didukung dengan efisiensi penggunaan input terutama pupuk, efisiensi penanganan panen tandan buah segar. Dalam kaitannya dengan peremajaan, hal lain yang diperlukan adalah penyediaan bibit unggul. Namun, untuk meningkatkan produktivitas tersebut petani terutama di wilayah dengan produktivitas rendah menghadapi akses untuk memperoleh teknologi, bahan tanam dan modal. Kelemahan akses sumber daya ini mengancam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Perkebunan Rakyat.

Masalah ekonomi pada tataran internasional terkait dengan persaingan produk, yaitu antara minyak sawit dengan minyak nabati lainnya. Pada dasarnya minyak sawit memiliki daya saing lebih kuat dibandingkan minyak nabati lainnya. Data Oil World tahun 2008 menunjukkan bahwa produktivitas kedelai/biji-bijian sekitar 2-2,5 ton/ha/tahun (0,45-0,67 ton minyak biji-bijian/ha) berbanding produktivitas kelapa sawit sekitar 18-20 ton TBS/ha/tahun (3,6-4 ton CPO/ha). Hal ini berarti kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang paling efisien di dunia, hanya memerlukan sekitar 0,25– 0,28 ha untuk menghasilkan 1 ton CPO sebagai bahan baku minyak sawit, sementara tanaman kedelai, bunga matahari dan rapeseed memerlukan 1,5-2 ha untuk menghasilkan 1 ton minyak biji-bijian. Hal ini berarti minyak nabati lainnya lebih boros dalam penggunaan sumberdaya lahan dibandingkan dengan kelapa sawit. Dalam kaitan pertambahan luas areal tanam minyak nabati dunia, data Oil World (Lampiran 3) dalam Patriawan (2010) mencatat hanya 3 jenis tanaman penghasil minyak nabati yang mengalami pertambahan luas tanam yang signifikan dari tahun 2005/2006 sampai dengan 2009/2010, yaitu:



- (i) kedelai = 2,4 juta ha
- (ii) rapeseed = 915 ribu ha
- (iii) kelapa sawit = 676,5 ribu ha

Dalam rangka memperkuat daya saing minyak nabati selain minyak sawit, stakeholders minyak nabati lain dimotori oleh LSM lingkungan dan sosial dalam kerangka RSPO mengembangkan hambatan teknis bagi minyak kelapa sawit. Alasannya adalah peningkatan luas areal kelapa sawit diklaim sebagian berasal dari konversi hutan alam dan lahan gambut yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Minyak kelapa sawit menghadapi hambatan teknis perdagangan melalui pemberlakuan prinsip dan kriteria pembangunan berkelanjutan, sementara hal yang sama tidak berlaku untuk minyak nabati lain (minyak rapeseed, kedelai dan lainnya). Akibatnya, persaingan antar minyak nabati menjadi tidak sesuai ketentuan WTO yang menerapkan tarif impor.

Masalah sosial yang muncul pada daerah pengembangan kelapa sawit, seperti disarikan oleh Teoh (2010) dari berbagai rujukan berpusat pada pertanyaan tentang pemilikan dan penggunaan lahan serta bagaimana pengalihan haknya. Teoh (2010) mengutip catatan Konsorsium Reformasi Agraria +tentang adanya 32 persen atau 261 konflik dan catatan Sawit Watch tentang adanya 570 konflik. Jiwan (2009) menyatakan bahwa masalah ini terjadi karena sejak era Soeharto hak masyarakat atas lahan memang tidak dikenal. Masyarakat lokal memperoleh perlakuan diskriminatif dalam pemanfaatan barang dan jasa dari ekosistem hutan.

Masalah lain terkait dengan peranan perkebunan rakyat dan risiko yang dihadapi karena rendahnya produktivitas, transparansi penentuan harga dan akses pada lembaga keuangan. Menurut Vermoulen dan Goad (2006), kendala utama petani meliputi kesulitan untuk mendapatkan modal karena tidak dapat memenuhi syarat hubungan kolateral untuk pembiayaan melalui bank, ketiadaan pembinaan teknis dan informasi pasar. Terkait informasi pasar ini, perolehan harga yang adil atas TBS yang dihasilkan merupakan kunci utama perhatian mereka. Menurut Aleksander (2009), Serikat Petani Kelapa Sawit di Kalimantan Barat (SPKS) merasakan bahwa mekanisme penetapan harga TBS tidak transparan. Walaupun didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian, petani tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam proses penentuan harga. Mereka menganggap sistem penentuan harga tidak adil. Teoh (2010) menyimpulkan bahwa dalam struktur pasar yang berdifat monopsonis di wilayah pedesaan ini, petani menjadi lemah dalam posisi tawarnya.

Dalam hal lingkungan Teoh (2010), mengutip pandangan berbagai LSM, menyatakan bahwa masalah lingkungan terkait dengan usaha kelapa sawit diantaranya adalah masalah

deforestasi, biodiversitas dan perubahan iklim. Beberapa waktu terakhir, proses alih fungsi hutan alam dan lahan gambut berkontribusi negatif berupa deforestasi, degradasi lahan gambut, degradasi sumber daya air, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pembangunan kelapa sawit juga diklaim tidak sesuai dengan peraturan tata ruang; dan terdapat kebun kelapa sawit di kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Terlepas dari isu tersebut, pada dasarnya telah banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan usaha dan mereka menjadi anggota *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Development*.

Terkait dengan masalah tata kelola, isu yang berkembang adalah adanya anggapan bahwa pemerintah daerah melakukan politisasi perizinan, sehingga izin pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terkendali. Izin di daerah dikeluarkan Bupati dengan atau didasarkan Perda dan bisa mendahului persyaratan lain, seperti Analisa Dampak Lingkungan. Seperti diketahui, perusahaan dapat mengajukan kepada pemerintah daerah (kabupaten) untuk penggunaan lahan. Prosesnya meliputi beberapa ijin dan memerlukan negosiasi dengan individu dan masyarakat lokal. Politisasi perijinan ini terjadi karena pengetahuan yang kurang dari individu dan masyarakat atas hak mereka dan bagaimana proses dan prosedur yang harus diikuti.

Sementara itu, pembangunan kelapa sawit juga tidak diikuti dengan informasi pembangunan kebun yang kurang transparan sehingga menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat baik konflik horizontal maupun vertikal. Masalah ini pada dasarnya merupakan masalah implementasi karena peraturan perundang-undangan yang ada telah cukup komprehensif.

## IV. ALTERNATIF STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. Identifikasi Lingkungan Strategis dan Alternatif Strategi

Identifikasi lingkungan strategis internal dan eksternal industri kelapa sawit didahului dengan pemahaman tentang arah kebijakan yang selanjutnya diikuti dengan analisis SWOT, yaitu menganalisis kekuatan (*Strength/S*), kelemahan (*Weakness/W*), peluang (*Opportunity/O*) dan ancaman (*Threat/T*) dari industri kelapa sawit. Analisis SWOT (Rangkuti, 2005) merupakan jenis analisis yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun pada saat bersamaan dapat meminimumkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis (strategi dan kebijakan) dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam Naskah Kebijakan ini analisis SWOT diterapkan untuk pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan berkeadilan. Analisis SWOT untuk analisis kebijakan juga sudah diterapkan oleh Kementerian Perindustrian dalam penyusunan Rencana Strategis 2010-2014 (Kementerian Kehutanan, 2010).

#### 4.1.1. Arah Kebijakan

Dalam naskah kebijakan ini, arah kebijakan dalam pengembangan industri kelapa sawit ke depan adalah peningkatan daya saing dan nilai tambah industri kelapa sawit secara berkelanjutan dan berkeadilan. Arah kebijakan ini dianggap telah mengakomodasi kepentingan ekonomi (daya saing dan nilai tambah), sosial (berkeadilan) dan lingkungan (berkelanjutan) dalam pengembangan industri kelapa sawit.

#### 4.1.2. Analisis SWOT

##### (i) Kekuatan (*S*)

Indonesia merupakan negara produsen dan pengeksport minyak sawit terbesar di dunia sehingga menjadi bagian dari rantai pasok minyak sawit bahkan minyak nabati dunia yang menentukan. Bersama Malaysia, Indonesia menguasai pasar ekspor minyak sawit dunia sekitar 80% dan minyak sawit tersebut berkontribusi hampir 60% dari ekspor minyak nabati dunia. Sebagai negara besar, perubahan pasokan dari Indonesia dapat mempengaruhi pasar minyak sawit dan minyak nabati dunia.

Industri kelapa sawit (dalam hal ini Industri CPO) mempunyai kekuatan dalam hal keterkaitan dan kekuatan efek pengganda pendapatan, output dan tenaga kerja terhadap industri lain. Industri kelapa sawit juga berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi

penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penyedia bahan baku industri pangan dan non-pangan; dan peningkatan devisa negara. Dalam pengembangannya melalui pemanfaatan hutan dan lahan gambut, peraturan perundang-undangan yang mengatur pengembangan industri kelapa sawit juga telah bersifat komprehensif mencakup aspek teknologi, ekonomi dan bisnis, sosial dan lingkungan.

(ii) *Kelemahan (W)*

Pengembangan industri kelapa sawit dipercaya telah mampu mempromosikan perkembangan perekonomian, namun dalam kaitannya dengan pengembangan produk, nilai tambah dan diversifikasi produk yang dihasilkan industri kelapa sawit dianggap belum optimal, masih didominasi minyak sawit mentah dan produk turunan sederhana (Olein dan stearin). Selain itu, terdapat dampak negatif yang ditimbulkan dari pengembangan industri kelapa sawit, seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Dampak negatif ini terjadi karena terdapat distorsi tata kelola dan implementasi peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan perizinan.

(iii) *Peluang (O)*

Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan minyak sawit dicirikan dengan adanya peningkatan pangsa pasar minyak sawit di pasar internasional dan domestik. Minyak sawit dan produk turunannya menggeser pangsa pasar minyak kedelai dan minyak nabati lainnya. Bahkan, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk, perkembangan permintaan pasar produk minyak sawit untuk pangan meningkat secara konsisten. Potensi lain yang mulai nampak adalah seiring dengan tuntutan penggunaan energi terbarukan, permintaan minyak sawit juga akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi (biodiesel).

(iv) *Ancaman (T)*

Prospek positif industri kelapa sawit ternyata juga diwarnai dinamika negara pengimpor minyak sawit yang mengarah pada kampanye negatif kelapa sawit. Dua isu menonjol yang ditampilkan adalah pembangunan kelapa sawit dikaitkan dengan perubahan iklim sebagai akibat dari kerusakan lingkungan (emisi karbon, degradasi lahan dan kehilangan biodiversity) dan juga dikaitkan dengan konflik sosial. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pengembangan industri kelapa sawit diklaim menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Salah satu perusahaan besar nasional (Sinar Mas) mengalami pembatalan kontrak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan multinasional (Unilever, Nestle dan Burger King).

#### 4.1.3. Alternatif Strategi

Berdasarkan identifikasi lingkungan strategis di atas, beberapa alternatif strategi pengembangan industri kelapa sawit dapat dirumuskan sebagai berikut :

(i) **Strategi S-O (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang).**

Kekuatan yang dimiliki industri kelapa sawit digunakan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan berupa promosi, advokasi dan kampanye positif publik tentang industri kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Masih dalam strategi S-O, pengembangan industri kelapa sawit sudah harus dilakukan melalui pengembangan (diversifikasi) dan peningkatan nilai tambah produk untuk memanfaatkan peningkatan permintaan minyak sawit dan produk turunannya yang prospektif.

(ii) **W-O (menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang).**

Dampak negatif yang ada terhadap lingkungan di atasi dengan kebijakan penerapan standar pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO) secara *mandatory*. ISPO ini dirancang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konflik sosial yang ada di atasi dengan kebijakan pengembangan mekanisme resolusi konflik, terutama terkait dengan sertifikat lahan dan Hak Guna Usaha (HGU), pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya untuk peningkatan produktivitas dan peremajaan. Sementara, masalah perizinan di atasi dengan kebijakan reformasi tata kelola perizinan dan transparansi informasi. Kebijakan menanggulangi kelemahan di atas digunakan untuk memanfaatkan peluang melalui penerapan kebijakan pengembangan (diversifikasi) dan peningkatan nilai tambah produk.

(iii) **S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)**

Kekuatan industri kelapa sawit nasional digunakan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Selain itu, pemanfaatan hutan diatur dengan pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut untuk kelapa sawit, dan kepada pelaku usaha diterapkan juga kebijakan untuk mendorong penerapan prinsip dan kriteria RSPO secara *voluntary*.

(iv) **W-T (memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman)**

Dampak negatif terhadap lingkungan yang ada di atasi dengan kebijakan penerapan ISPO, reformasi tata kelola perizinan dan transparansi informasi, pengendalian

konversi hutan alam dan lahan gambut untuk kelapa sawit, dan mendorong penerapan prinsip dan kriteria RSPO. Sementara, dampak sosial negatif di atasi dengan pengembangan mekanisme resolusi konflik, terutama terkait dengan sertifikat lahan dan HGU, pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya untuk peningkatan produktivitas dan peremajaan.

Hasil analisis lingkungan strategis industri kelapa sawit, dan alternatif strategi pengembangan industri kelapa sawit disajikan pada Tabel 1. Strategi yang disusun diarahkan agar terfokus bukan bermacam-macam (*broad base*) dan penerapannya merupakan bauran strategi bukan salah satu strategi. Pertimbangan ini digunakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Dengan demikian komponen alternatif strategi yang disusun dapat digunakan/dikombinasikan dengan komponen lain dalam alternatif strategi yang berbeda. Dalam perspektif ini, arah kebijakan dapat digunakan sebagai strategi dasar.

#### 4.1.4. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan uraian di atas (Tabel 1), beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan adalah:

- (i) Promosi, advokasi dan kampanye publik industri kelapa sawit
- (ii) Pengembangan produk (hilir dan samping) dan peningkatan nilai tambah
- (iii) Penguatan dan penegakan hukum dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan tata kelola perizinan
- (iv) Transparansi informasi pembangunan kebun kelapa sawit
- (v) Pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya
- (vi) Pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut
- (vii) Dorongan penerapan prinsip dan kriteria RSPO
- (viii) Pengembangan mekanisme resolusi konflik

**Tabel 1. Analisis Lingkungan Strategis dan Alternatif Strategi**

	<p><b>Kekuatan (S):</b>                  (i) Minyak sawit Indonesia menentukan rantai pasok minyak sawit dunia yang menentukan; (ii) keterkaitan dan kekuatan efek pengganda cukup kuat; (iii) peraturan perundang-undangan komprehensif; (iv) industri kelapa sawit berperan strategis</p>	<p><b>Kelemahan (W) :</b>                  (i) kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan biodiversitas, (ii) nilai tambah dan diversifikasi produk belum optimal, (iii) distorsi tata kelola dan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan perizinan</p>
<p><b>Peluang (O):</b>                  (i) peningkatan pangsa pasar minyak sawit, (ii) perkembangan permintaan pasar produk minyak sawit (food, feed, fuel dan fibre)</p>	<p><b>S-O (menggunakan kekuatan dengan memanfaatkan peluang):</b> (i) Promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit Indonesia, (ii) diversifikasi produk dan (iii) peningkatan nilai tambah.</p>	<p><b>W-O (menangulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang):</b>                  (i) Penguatan dan penegakan hukum dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, (ii) pengembangan mekanisme resolusi konflik, (iii) pengembangan aksesibilitas petani, (iv) transparansi informasi dan (v) diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk.</p>
<p><b>Ancaman (T):</b>                  pembangunan kelapa sawit dikaitkan dengan (i) perubahan iklim dan (ii) konflik sosial.</p>	<p><b>S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman):</b> (i) Promosi, advokasi dan kampanye publik, (ii) pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut, dan (iii) mendorong penerapan prinsip dan kriteria RSPO.</p>	<p><b>W-T (memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman):</b> (i) Penguatan dan penegakan hukum pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, (ii) pengembangan resolusi konflik, (iii) reformasi tata kelola, (iv) transparansi informasi, (v) pengembangan aksesibilitas petani, (vi) pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut, dan (vii) mendorong penerapan prinsip dan kriteria RSPO.</p>





## V. ANALISIS ATAS PILIHAN ALTERNATIF

### 5.1. Analisis Kebijakan dan Strategi

Analisis atas pilihan alternatif dilakukan melalui survai dengan menggunakan kuesioner. Responden merupakan stakeholder utama dalam pembangunan perkelapaswitan, termasuk dari unsur birokrasi pemerintah (BAPPENAS dan Ditjenbun), perguruan tinggi (IPB), penelitian (Riset Perkebunan Nusantara), pelaku usaha (anggota Gabungan Produsen Kelapa Sawit Indonesia/GAPKI) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial. Responden memberikan penilaian (*scoring*) atas kondisi lingkungan strategis yang ada dan alternatif kebijakan/strategi yang ada, sesuai dalam analisis SWOT. Penilaian dengan skor dilakukan atas kesesuaian masing-masing alternatif strategi terhadap tujuan, sasaran, visi dan misi pengembangan industri kelapa sawit. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa strategi dasar yang perlu diterapkan secara berurutan adalah S-O, W-O, S-T dan W-T (Tabel 2).

Masing-masing strategi dasar disarankan untuk diterapkan sebagai *mixed strategy* atau bauran strategi disesuaikan dengan kebutuhan/situasi. Sebagai contoh, untuk menghadapi pasar domestik dan pasar negara-negara dengan permintaan tinggi, seperti Cina, India, dan Pakistan, maka strategi dasar S-O dan W-O lebih diutamakan. Sementara, untuk menghadapi pasar internasional yang restriktif, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan Australia, maka strategi S-T dan W-T lebih diutamakan. Penerapan strategi bauran dilakukan secara fleksibel dengan dukungan kebijakan strategis yang diturunkan dari alternatif strategi terpilih.

**Tabel 2. Hasil Pemeringkatan Alternatif Strategi Pengembangan Daya Saing dan Nilai Tambah Kelapa Sawit**

Strategi Dasar	Skor Keterkaitan				Nilai	Peringkat
	Tujuan	Sasaran	Visi	Misi		
S-O	178	318	21	126	643	1
W-O	162	281	22	141	606	2
S-T	149	251	20	133	553	4
W-T	155	254	21	144	574	3

Keterangan:

Skala skor keterkaitan strategi dan Tujuan, Sasaran, Visi, dan Misi : 1 sampai dengan 4

1 = Kurang/tidak ada keterkaitan, 2 = Keterkaitan sedang, 3 = Keterkaitan kuat, dan 4 = Keterkaitan sangat kuat

## 5.2. Analisis Kebijakan

Langkah strategis dimaksud penerapannya melalui kebijakan yang penilaiannya berdasarkan kemungkinan dampak lingkungan, sosial, teknologi, ekonomi, finansial dan politik yang ditimbulkan (Tabel 3).

**Tabel 3. Penilaian Alternatif Kebijakan Berdasarkan Dampak**

No	Alternatif Kebijakan	JUMLAH						TOTAL	Ranking
		Ling	Sos	Tek	Eko	Fin	Pol		
1	Promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit	29	32	31	34	29	31	186	3
2	Pengembangan produk (hilir dan samping) dan peningkatan nilai tambah produk	33	36	36	37	32	26	200	1
3	Penguatan dan penegakan hukum pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) dan tata kelola perizinan	32	26	24	25	25	32	164	6
4	Transparansi informasi pembangunan kebun kelapa sawit	31	35	31	32	30	30	189	2
5	Pengembangan mekanisme resolusi konflik	32	32	24	32	23	30	173	5
6	Pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya	30	35	25	31	26	26	173	5
7	Pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut	32	26	29	28	23	25	163	7
8	Mendorong prinsip dan kriteria RSPO	35	30	30	31	27	27	180	4
	JUMLAH	254	252	230	250	215	227		

Keterangan:

Skor kemungkinan penerapan berdasar kriteria: 1 = Tidak mungkin diterapkan, 2 = Mungkin diterapkan, 3 = Sangat mungkin diterapkan, dan 4 = Sudah diterapkan/harus diterapkan

Hasil penilaian peserta FGD menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan pengembangan produk hilir dan produk samping dan peningkatan nilai tambah menduduki peringkat pertama, diikuti dengan transparansi informasi pembangunan kebun kelapa sawit, promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit, dan seterusnya. Hasil penilaian ini mengisyaratkan bahwa peserta FGD masih berfikir lebih mengutamakan pengembangan industri kelapa sawit dibandingkan terhadap gencarnya kritik terhadap dampak negatif bagi lingkungan dan terjadinya konflik sosial.

## 5.3. Strategi Operasional

Alternatif kebijakan seperti tertuang dalam Tabel 3 perlu dioperasionalkan lebih lanjut dalam strategi dan kegiatan untuk mengatasi isu-isu pembangunan kelapa sawit dalam

rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan. Sesuai dengan alternatif kebijakan yang disepakati, dirumuskan strategi operasional yang merupakan penjabaran dari masing-masing kebijakan sekaligus merupakan bahan penyempurnaan dari langkah operasional yang telah disusun dalam Road Map Pembangunan Kelapa Sawit. Strategi operasional untuk masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

### 5.3.1. Promosi, Advokasi dan Kampanye Publik Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan

Langkah operasional yang diperlukan adalah respon kebijakan yang jelas dan tegas untuk menghadapi kampanye negatif yang menyatakan bahwa pembangunan kelapa sawit merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial tanpa melihat peran ekonomi kelapa sawit, terutama dalam pengurangan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah dapat memfasilitasi pemanfaatan berbagai fakta dan hasil penelitian yang menunjukkan peran positif kelapa sawit sebagai materi promosi, advokasi dan kampanye publik. Dampak lingkungan dan sosial yang tidak dikehendaki merupakan eksekusi dan lebih disebabkan oleh masalah penegakan hukum dan manajemen kebun. Seperti diketahui, respon atas kampanye negatif saat ini memang sudah dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan dan pemerintah. Namun, langkah untuk meningkatkan intensitas promosi dan advokasi dalam menghadapi kampanye negatif masih diperlukan.

Langkah lain yang sedang dirintis, yaitu penggunaan standar pembangunan kelapa sawit berkelanjutan perlu segera direalisasikan. *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* merupakan petunjuk pelaksanaan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ISPO ini dapat dijadikan alat promosi, advokasi dan kampanye publik untuk memperkuat posisi tawar kelapa sawit Indonesia. Seperti ditentukan dalam konsep, ISPO mensyaratkan 7 prinsip yang diturunkan tidak kurang dari 20 peraturan perundang-undangan dalam penerapan pembangunan perkebunan kelapa sawit, yaitu:

- (i) Sistem perizinan dan manajemen kebun
- (ii) Penerapan pedoman teknis sistem budidaya dan pengolahan kelapa sawit
- (iii) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- (iv) Tanggung jawab terhadap pekerja
- (v) Tanggung jawab terhadap individu dan komunitas (masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit)
- (vi) Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat
- (vii) Komitmen terhadap perbaikan ekonomi secara terus menerus.

### 5.3.2. Pengembangan Produk (Hilir dan Samping) dan Peningkatan Nilai Tambah

Langkah operasional yang diperlukan diantaranya adalah pembentukan klaster industri kelapa sawit sesuai dengan potensi produksi kelapa sawit yang telah ada dan yang akan dikembangkan. Hambali (2009) menyampaikan bahwa keterkaitan industri inti, industri terkait dan industri pendukung merupakan kunci dalam pembentukan dan pengembangan klaster industri kelapa sawit (Lampiran 4). Dengan pengertian ini maka kerjasama/koordinasi tanpa hirarki antar stakeholders (swasta, pemerintah, lembaga keuangan, LSM, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lainnya) sangat diperlukan dalam rangka pengembangan klaster.

Langkah operasional yang diperlukan dari sisi pemerintah diantaranya adalah memberikan berbagai insentif terkait pelaksanaan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan, seperti (i) pengembangan jaringan infrastruktur secara terintegrasi, (ii) pemberian subsidi, restitusi atau ditanggung pemerintah untuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) dan bea masuk (BM) untuk peralatan dan mesin-mesin, serta produk hilir, (iii) pemberian subsidi bunga kredit investasi dan modal kerja, (iv) memprioritaskan alokasi kredit untuk pengembangan industri hilir, (v) pajak ditanggung pemerintah/tax holiday bagi investor yang membangun infrastruktur, dan (vi) insentif bea keluar untuk ekspor produk hilir dan samping dan disinsentif bea keluar untuk ekspor bahan mentah dengan tetap memperhatikan keberadaan industri hulu. Pemberian disinsentif diberlakukan jika persyaratan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dilanggar.

Langkah operasional di atas perlu didukung dengan penelitian dan pengembangan (litbang) produk dan nilai tambah. Untuk itu diperlukan beberapa perhatian terhadap litbang, seperti (i) peningkatan investasi untuk litbang melalui peningkatan proporsi anggaran yang signifikan guna pelaksanaan litbang, (ii) menentukan agenda riset yang bisa dikerjasamakan dengan lembaga riset dan PT. Pemberian insentif berupa keringanan pajak diberikan bagi swasta yang bekerjasama dengan lembaga litbang dalam pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk turunan kelapa sawit, (iii) penelitian pengembangan komoditas kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pangan (minyak goreng), pakan, bahan bakar dan serat, dan (iv) pengembangan rantai nilai industri pengolahan CPO dan turunannya untuk peningkatan daya saing dan peningkatan pangsa pasar.

### 5.3.3. Penguatan dan Penegakan Hukum dalam Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Tata Kelola Perizinan

Langkah operasional yang diperlukan diantaranya adalah pengembangan sistem manajemen penerapan hukum dan perizinan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Seperti diketahui, hukum-hukum terkait dengan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di dalamnya termasuk perizinan pada dasarnya telah dimiliki oleh Indonesia. Masalah tumpang-tindih hukum antarsektor dan antar-pemerintah pusat dan daerah hanya dapat diatasi dengan memperbaiki sistem manajemen penerapannya. Sistem manajemen penerapan yang baik akan dicerminkan dengan (i) adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi, (ii) hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh masyarakat lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan, dan (iii) penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan hak tradisional masyarakat lokal.

Dalam hal perizinan, langkah operasional bagi perusahaan untuk dapat beroperasi ditentukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (i) Memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Penggunaan Tanah/Surat Pendaftaran/Sertifikasi Tanah;
- (ii) Sesuai dengan RUTWP (Rencana Umum Tataruang Wilayah Provinsi) dan RUTWK (Rencana Umum Tataruang Wilayah Kabupaten/Kota);
- (iii) Sengketa lahan dan kompensasi telah diselesaikan;
- (iv) Berupa usaha budidaya dan/atau pengolahan hasil dengan pengelolaan berbentuk PBN, PBS (Asing, Nasional), Koperasi dan Perkebunan Rakyat.

### 5.3.4. Transparansi Informasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit

Langkah operasional yang diperlukan antara lain adalah informasi tentang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit kepada *stakeholders*, khususnya individu dan masyarakat lokal terkait dengan perizinan, pembangunan kebun dan pengolahan kelapa sawit, dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholders. Penyelenggaran informasi adalah lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai koordinasi lembaga pemerintah, sedangkan penyedia informasi adalah perusahaan perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat lokal. Dokumen informasi tentang pembangunan kelapa sawit ini tersedia secara umum dengan tetap menjamin kerahasiaan perusahaan dalam bidang keuangan. Transparansi dokumen tersebut juga diyakini tidak akan berdampak negatif terhadap perusahaan, masyarakat (petani) dan lingkungan.

Pemerintah daerah (kabupaten/kota) menjadi lembaga terdepan dalam pemberian informasi ini.

### **5.3.5. Pengembangan Aksesibilitas Petani Terhadap Sumber Daya**

Langkah operasional yang diperlukan di antaranya (i) modifikasi program revitalisasi perkebunan kelapa sawit melalui penyediaan fasilitas kredit tanpa jaminan, terutama untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat. Hal ini sebagai solusi masalah sertifikat dan avalis yang dijumpai pada program revitalisasi perkebunan kelapa sawit, (ii) pemberian subsidi bunga sehingga tingkat bunga kredit menjadi murah dan terjangkau oleh petani, (iii) penyediaan tenaga pendamping dalam penerapan inovasi teknologi dan kelembagaan. Tenaga pendamping ini adalah tenaga yang kompeten di bidang teknologi budidaya kelapa sawit dan kelembagaan petani, dan (iv) penyediaan lahan bagi petani untuk menguasai lahan-lahan terlantar atau lahan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah operasional di atas perlu didukung dengan (i) pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani sehingga kelembagaan petani mempunyai status hukum yang pasti (ii) sosialisasi dan pelatihan kepada petani tentang penerapan berbagai teknologi, termasuk tentang bibit palsu, dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, (iii) penerapan model peremajaan kelapa sawit yang telah memperhitungkan kebutuhan teknologi, modal dan manajemen peremajaan, terutama bagi perkebunan kelapa sawit rakyat, (iv) pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit, seperti penyediaan teknologi, sarana produksi (pupuk organik dan non-organik serta obat-obatan) dan prasarana (alat dan mesin), serta informasi agribisnis terutama bagi perkebunan kelapa sawit rakyat, (v) penerapan kerjasama kemitraan antara lembaga petani dan perusahaan yang efektif dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Kemitraan, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan Aturan-aturan Pelaksanaannya), dan (vi) fasilitasi pengembangan kelembagaan petani melalui penumbuhan dari bawah dan mampu menampung kepentingan para petani anggotanya dan pengembangan kegiatan usaha.

### **5.3.6. Pengendalian Konversi Hutan Alam dan Lahan Gambut**

Langkah operasional yang diperlukan diantaranya adalah (i) Percepatan padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) semua tingkatan. Penguatan penataan ruang dilakukan melalui mekanisme insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi. Daerah yang tidak menyelesaikan padu serasi tersebut terutama daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit perlu mendapat perhatian serius, (ii) Percepatan pelepasan kawasan hutan untuk hutan bagi areal penggunaan lain (APL).

Penerapannya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk moratorium hutan disertai penguatan hukum dalam implementasinya, (iii) Pemberian izin perluasan kebun diberlakukan untuk perusahaan yang berkinerja baik, (iv) Perluasan lahan hanya diijinkan bila produktivitas kebun sudah mencapai titik optimal, (v) Perluasan dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian terlantar.

### 5.3.7. Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO

Salah satu hal utama yang harus diperhatikan adalah penerapan prinsip dan kriteria RSPO dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, bukan masalah keanggotaan. Seperti diketahui, penerapan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan harus menjadi komitmen pembangunan kelapa sawit berkelanjutan. Langkah operasional yang diperlukan diantaranya adalah (i) sosialisasi dan pelatihan penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, terutama kepada petani, (ii) monitoring dan evaluasi penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, dan (iii) fasilitasi promosi, advokasi dan kampanye positif bahwa pembangunan perkebunan di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

### 5.3.8. Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik

Langkah operasional yang diperlukan diantaranya adalah penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif dari pembangunan kelapa sawit. Mekanisme tersebut diterapkan secara terbuka/transparan melalui komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau industri pengolahan kelapa sawit, masyarakat lokal, dan kelompok kepentingan lainnya. Mekanisme ini menghasilkan suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan. Setiap masalah sosial seperti masyarakat lokal kehilangan hak legal atau hak adat didokumentasikan sehingga masyarakat lokal dan stakeholders lainnya dapat mengetahui secara jelas. Sistem yang diterapkan merupakan sistem yang diterima oleh semua stakeholders.

Dalam rangka resolusi konflik, kerjasama kemitraan antara perusahaan perkebunan dan industri pengolahan kelapa dengan masyarakat sekitar/petani untuk mengembangkan perkebunan rakyat perlu didorong. Untuk itu, penguatan SDM bidang kelembagaan petani, baik dari pihak petani maupun perusahaan, perlu dilakukan. SDM yang kuat akan mampu mengembangkan resolusi mekanisme resolusi konflik.





## VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1. Kesimpulan

1. Sejarah, potensi dan peluang pembangunan kelapa sawit mengindikasikan bahwa kelapa sawit masih mempunyai prospek positif ke depan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing, dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, kelapa sawit juga menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Permasalahan kelapa sawit ini perlu di atasi supaya tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar.
2. Dengan menggunakan analisis SWOT, diperoleh 8 alternatif kebijakan yang penting dan strategis untuk dilaksanakan dalam pembangunan kelapa sawit yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan, yaitu:
  - (i) pengembangan produk (hilir dan samping) dan peningkatan nilai tambah produk kelapa sawit;
  - (ii) transparansi informasi pembangunan kebun kelapa sawit;
  - (iii) promosi, advokasi dan kampanye publik tentang industri kelapa sawit berkelanjutan;
  - (iv) mendorong prinsip dan kriteria RSPO;
  - (v) pengembangan mekanisme resolusi konflik;
  - (vi) pengembangan aksesibilitas petani terhadap sumber daya;
  - (vii) penguatan dan penegakan hukum pembangunan kelapa sawit berkelanjutan (ISPO) dan tata kelola perizinan, dan;
  - (viii) pengendalian konversi hutan alam dan lahan gambut.
3. Strategi yang penting dalam implementasi masing-masing kebijakan tersebut sebagai berikut:
  - (i) **Pengembangan Produk (Hilir dan Samping) dan Peningkatan Nilai Tambah**
    - Pembentukan kluster industri kelapa sawit sesuai dengan potensi produksi kelapa sawit yang telah ada dan yang akan dikembangkan.

- Penyediaan dan pemberian berbagai insentif terkait pelaksanaan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan berkeadilan, seperti (a) pengembangan jaringan infrastruktur secara terintegrasi, (b) insentif fiskal bea masuk untuk peralatan dan mesin-mesin, (c) alokasi kredit dengan subsidi bunga untuk investasi dan modal kerja untuk pengembangan industri hilir, (e) insentif bea keluar untuk ekspor produk hilir dan produk samping serta disinsentif bea keluar untuk ekspor bahan mentah dengan tetap memperhatikan keberadaan industri hulu. Pemberian disinsentif diberlakukan jika persyaratan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dilanggar.
- Penguatan penelitian dan pengembangan (Litbang) kelapa sawit melalui peningkatan anggaran dan investasi litbang, kerjasama penelitian dan pengembangan antara pemerintah, swasta dan lembaga penelitian termasuk perguruan tinggi, agenda riset pengembangan komoditas kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pangan (minyak goreng), pakan, bahan bakar dan serat, dan penelitian pengembangan daya saing.

**(ii) Transparansi Informasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit**

- Penyediaan dan pemberian informasi oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah tentang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit kepada stakeholders, khususnya individu dan masyarakat lokal, terkait dengan perizinan, pembangunan kebun dan pengolahan kelapa sawit, dalam bahasa yang dapat dimengerti stakeholders.

**(iii) Promosi, Advokasi dan Kampanye Publik Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan**

- Respon kebijakan yang jelas dan tegas untuk menghadapi kampanye negatif, terhadap kelapa sawit dengan memanfaatkan fakta dan hasil penelitian tentang kelapa sawit.
- Meningkatkan intensitas promosi dan advokasi dalam menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit.
- Menggunakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai alat promosi, advokasi dan kampanye publik untuk memperkuat posisi tawar kelapa sawit Indonesia.

**(iv) Dorongan Penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO**

- Sosialisasi dan pelatihan penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, terutama kepada petani.
- Monitoring dan evaluasi penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan.
- Fasilitasi promosi, advokasi dan kampanye positif bahwa pembangunan perkebunan di Indonesia telah menerapkan prinsip dan kriteria pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

**(v) Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik**

- Penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif dari pembangunan kelapa sawit.
- Kerjasama kemitraan antara perusahaan perkebunan dan industri pengolahan kelapa dengan masyarakat sekitar/petani untuk mengembangkan perkebunan rakyat.
- Penguatan SDM bidang kelembagaan petani, baik dari pihak petani maupun perusahaan

**(vi) Pengembangan Aksesibilitas Petani Terhadap Sumber Daya**

- Modifikasi program revitalisasi perkebunan kelapa sawit melalui penyediaan fasilitas kredit tanpa jaminan, terutama untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat.
- Pemberian subsidi bunga sehingga tingkat bunga kredit menjadi murah dan terjangkau oleh petani.
- Penyediaan tenaga pendamping dalam penerapan inovasi teknologi dan kelembagaan.
- Penyediaan lahan bagi petani untuk menguasai lahan-lahan terlantar atau lahan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani sehingga kelembagaan petani mempunyai status hukum yang pasti.
- Sosialisasi dan pelatihan kepada petani tentang penerapan berbagai teknologi, termasuk tentang bibit palsu, dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan

- Penerapan model peremajaan kelapa sawit yang telah memperhitungkan kebutuhan teknologi, modal dan manajemen peremajaan terutama bagi perkebunan kelapa sawit rakyat.
- Pengembangan layanan penunjang agribisnis kelapa sawit, seperti penyediaan teknologi, sarana produksi (pupuk organik dan non-organik serta obat-obatan) dan prasarana (alat dan mesin), serta informasi agribisnis terutama bagi perkebunan kelapa sawit rakyat.
- Penerapan kerjasama kemitraan antara lembaga petani dan perusahaan yang efektif dan berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Kemitraan, UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dan Aturan-aturan Pelaksanaannya)
- Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani melalui penumbuhan dari bawah dan mampu menampung kepentingan para petani anggotanya dan pengembangan kegiatan usaha.

**(vii) Penguatan dan Penegakan Hukum dalam Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Tata Kelola Perizinan**

- Pengembangan sistem manajemen penerapan hukum dan perizinan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dengan menerapkan indikator dan persyaratan yang jelas dan tertib.

**(viii) Pengendalian Konversi Hutan Alam dan Lahan Gambut**

- Percepatan padu serasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) semua tingkatan. Penguatan penataan ruang dilakukan melalui mekanisme insentif dan disinsentif serta peneanan sanksi. Daerah yang tidak menyelesaikan padu serasi tersebut terutama daerah yang memiliki perkebunan kelapa sawit perlu mendapat perhatian serius.
- Percepatan pelepasan kawasan hutan untuk hutan bagi areal penggunaan lain (APL). Penerapannya tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk moratorium hutan disertai penguatan hukum dalam implementasinya.

- Pemberian izin perluasan kebun diberlakukan untuk perusahaan yang berkinerja baik, yaitu perusahaan yang menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan indikator utama produktivitas yang dicapai sesuai dengan produktivitas menurut kelas lahan.
- Perluasan lahan hanya diijinkan bila produktivitas kebun sudah mencapai titik optimal.
- Perluasan dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian terlantar

## 6.2. Rekomendasi

1. Perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi pengembangan kelapa sawit yang dituangkan dalam Road Map Kelapa Sawit, dengan mengadopsi dan mengintegrasikan kebijakan dan strategi dalam kesimpulan di atas.
2. Kiranya penerapan kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan sebagai strategi bauran dan disesuaikan dengan kebutuhan/situasi pasar domestik dan internasional yang berlaku.



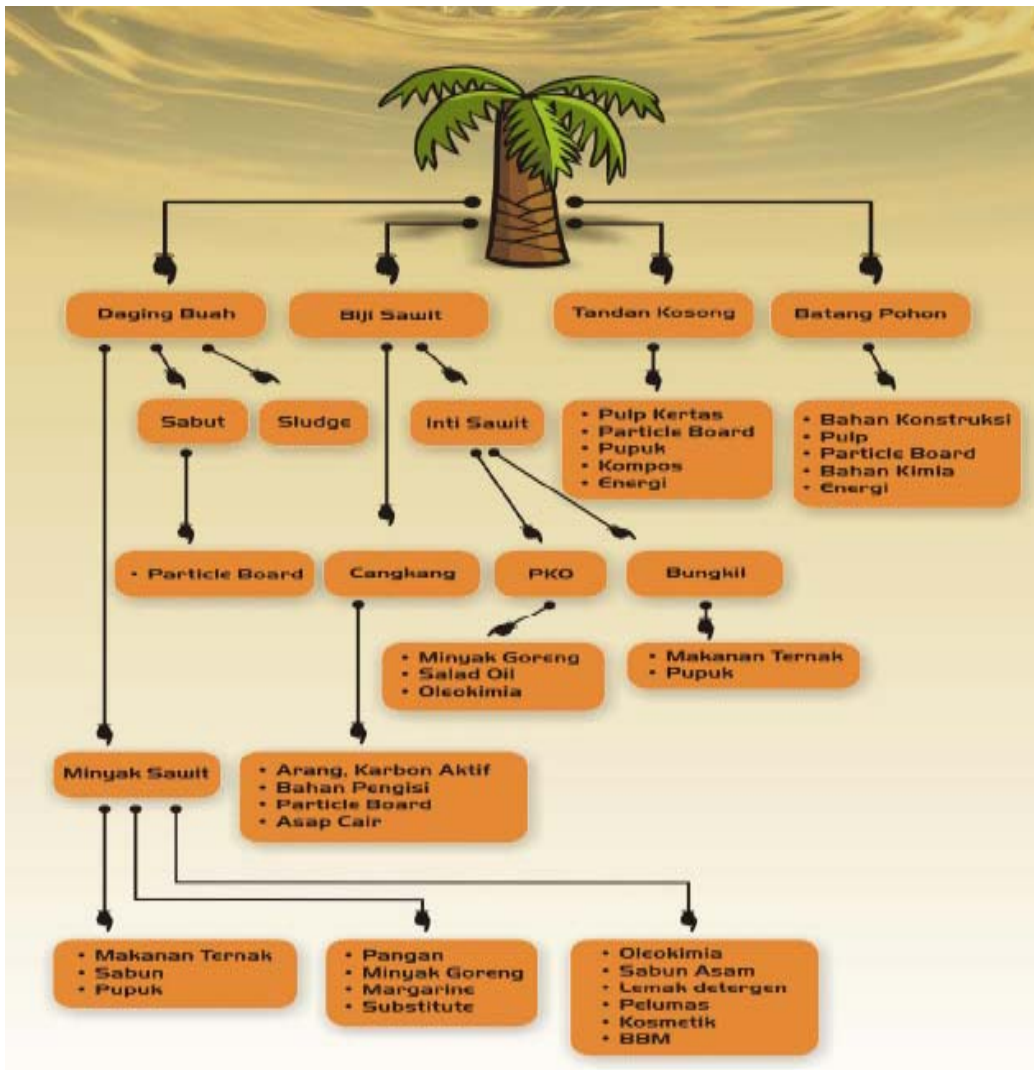
## DAFTAR PUSTAKA

- Aleksander, C. 2009. "The future of nucleus-plasma partnership" .Presentation at the RSPO Task Force for Smallholders meeting, 1 November, 2009, Kuala Lumpur.
- Badan Pusat Statistik. 2009. Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia – Ekspor. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2009. Statistik Perkebunan: Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010. Road Map Pembangunan Kelapa Sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2009. Roap Map Pengolahan CPO. Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Jakarta.
- Hambali, E. 2009. Contribution of Higher Education and Research Institutions to the Development of Palm Downstream Industrial Cluster. Presented in the Development of Palm Downstream Worksop in Riau Province held at Gran Melia Hotel on 24 June 2009. Surfactan and Bioenergy Research Center, Bogor Agricultural University.
- Jiwan, N.2009. "Political economy of the Indonesian palm oil industry: A critical analysis". Presentation at ISEAS Workshop on the Oil Palm Controversy in Transnational Perspective. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, March 2009.
- Kementerian Kehutanan, 2010. Rencana Strategis 2010 – 2014. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Oil World. 2009. Oil World Annual 2009. ISTA Mielke GmbH. Langenberg, Hamburg, Germany.
- Rangkuti, F. 2005. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rosediana. 2009. "Sustainable production in Indonesia". Presentation at the China International Oil and Oilseeds Summit 2009, 8-10 July 2009, Beijing.
- Susila, W. R. 2004. Contribution of Oil Palm Industry to Economic Growth and Poverty Alleviation in Indonesia. Jurnal Litbang Pertanian, No.23(3):107-114.
- Teoh, C.H. 2010. Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector. International Finance Corporation, World Bank Group.
- Vermeulen, S. And Goad, N. 2006. Towards better practice in smallholder palm oil production. Natural Resource Issues Series No. 5. International Institute for Environment and Development. London, UK.





Lampiran 1. Industri Hilir dan Produk Samping



## Lampiran 2. Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009

No HS	Jenis Minyak Sawit	Ekspor			Negara-negara Tujuan Ekspor Terbesar
		Volume (Ton)	Nilai (US\$ 000)	Unit price (US\$/ton)	
1511100000	Crude Palm Oil (CPO)/ Minyak Sawit Mentah	9.566.746 (56,85%)	5.702.126 (55,00%)	596,036	India, Belanda, Malaysia, Italia, Singapura, Cina
1511901000	Fractions of unrefined palm oil, not chemically modified	801.234 (4,76%)	526.903 (5,08%)	657,614	Banglades, India dan Cina
1511909010	Palm oil, refined, bleached and deodorised (RBD palm olein)	752.017 (4,47%)	480.732 (4,64%)	639,257	Mesir, Iran, Brazil, Ukraina, dan Pakistan
1511909020	Olein, refined, bleached and deodorised (RBD Olein)	4.107.638 (24,41%)	2.769.650 (26,71%)	674,268	Cina, India, Arab Saudi, Banglades, dan Mesir
1511909030	Stearin, refined, bleached and deodorised	1.554.304 (9,24%)	862.043 (8,31%)	554,617	Cina, Belanda, Malaysia, Italia, dan Jerman
1511909090	Other palm oil and its fractions, not chemically modified	47.266 (0,28%)	26.166 (0,25%)	553,590	Jepang, Cina, India, Myanmar, dan Pakistan

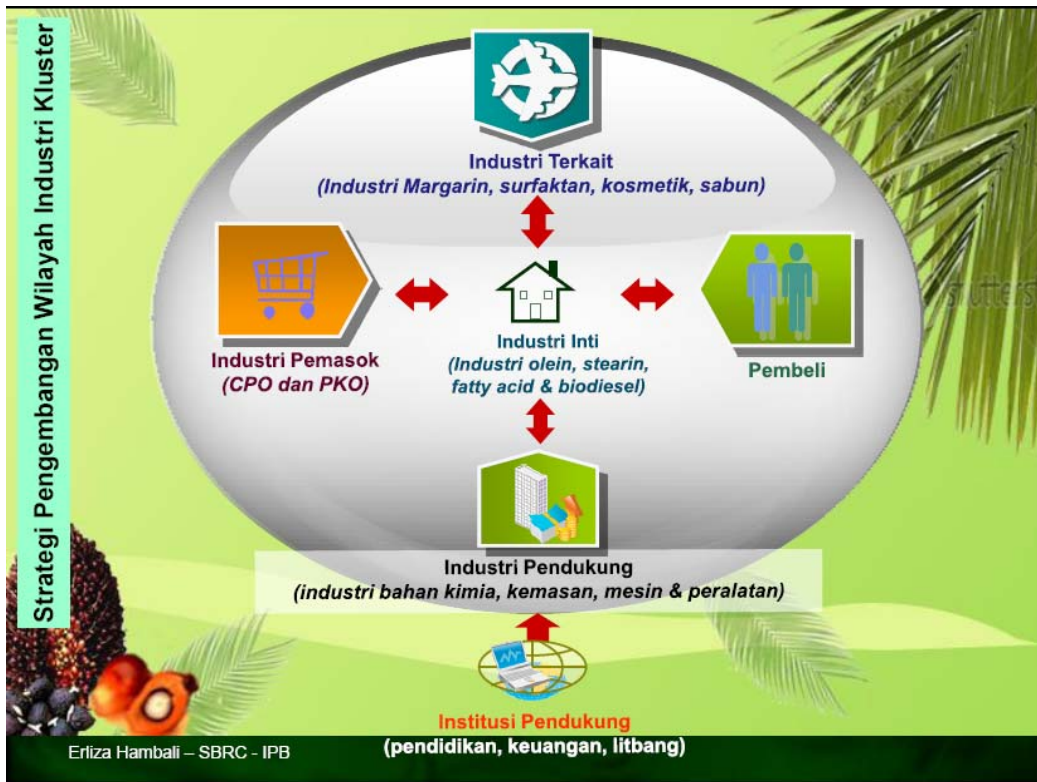
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010.

Lampiran 3. Luas Tanam 10 Jenis Minyak Nabati Dunia

Jenis Minyak Nabati	Luas (000 ha)					Perubahan (000 ha)				Rata-rata
	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	
Soybean	92.813	94.225	91.638	97.560	102.399	1.412	(2.587)	5.922	4.839	2.397
Rapeseed	27.372	26.963	29.169	31.224	31.031	(409)	2.206	2.055	(193)	915
Cotton	34.251	34.501	33.272	30.858	30.905	250	(1.229)	(2.414)	47	(837)
Sunflower	23.207	24.413	23.542	24.725	23.810	1.206	(871)	1.183	(915)	151
Groundnut	22.523	21.999	22.036	22.427	20.914	(524)	37	391	(1.513)	(402)
Oil Palm	10.066	10.687	11.445	12.117	12.772	621	758	672	655	677
Coconut	9.270	9.411	9.384	9.396	9.538	141	(27)	12	142	67
Sesameseed	7.743	7.655	7.555	7.580	7.804	(88)	(100)	25	224	15
Linseed	3.060	2.849	2.277	2.329	2.360	(211)	(572)	52	31	(175)
Castorseed	1.488	1.314	1.409	1.469	1.393	(174)	95	60	(76)	(24)

Sumber: Oil World Annual 2010 – Vol. 1 up to 2009/10

Lampiran 4. Kluster Industri Kelapa Sawit



Sumber: Hambali, 2009.